

Anti-Copyright



Melampaui Koreografi Demonstrasi

Rimba Jaya Jatnika

Rimba Jaya Jatnika
Melampaui Koreografi Demonstrasi
26 June 2026

sea.theanarchistlibrary.org

26 June 2026

Daftar Isi

Cara Negara Menjinakkan Kita	4
Jebakan Estetika	5
Memecah Naskah	7
Yang Belum Selesai	10

Aroma gas air mata tipis dari demonstrasi beberapa waktu lalu rasanya belum sepenuhnya hilang dari ingatan, namun pemandangan di titik aksi hari ini kembali menyuguhkan pemandangan yang persis sama. Speaker dipegang Koordinator Lapangan yang memakai jaket Almamater, bendera warna-warni berkibar, dan di ujung jalan sana, barikade berwarna coklat sudah berdiri kokoh—bahkan sebelum rombongan mahasiswa pertama memarkirkan kendaraannya di Tugu Toga.

Ironisnya, bagian paling menarik dari ritual ini bukan lagi isu yang kita iakkan. Hal yang membuat hati berdesir kecut justru kesadaran bahwa seluruh gerakan kita sudah sangat mudah ditebak. Jurnalis tahu kapan harus membidik kamera, polisi tahu kapan harus bersiap, dan sayangnya, hanya —sebagian dari—kita yang masih mengira sedang melakukan sebuah kejutan. Di sinilah kita berdiri di hadapan paradoks yang nyata: mengapa setiap kali kita melipatgandakan massa di jalanan, daya dobraknya justru terasa semakin melempem?

Sejujurnya, protes kita tidak lagi memicu kepanikan di ruang rapat Dewan Perwakilan Partai. Alih-alih menjadi hantaman tak terduga, aksi-aksi kita telah bergeser menjadi agenda rutin yang rapi; dijadwalkan dalam kalender mingguan Intelijen dan Keamanan Polri, diantisipasi oleh Dinas Perhubungan, bahkan difasilitasi dengan pengawalan aparat dari titik kumpul. Taring perlawanan kita tumpul bukan karena kita kekurangan orang di barisan, melainkan karena kita telah kehilangan elemen kejutan taktis di lapangan. Padahal, detak jantung dari setiap perlawanan sipil yang berhasil selalu bermula dari ketidakpastian yang bikin penguasa tidak bisa tidur nyenyak.

Sosiolog Charles Tilly sebenarnya memotret kegelisahan ini lewat konsepnya, *repertoire of contention* atau simpanan taktik perlawanan. Tilly mengingatkan bahwa cara kita protes tidak pernah jatuh dari langit. Taktik itu terus bermutasi: berawal dari kemarahan spontan warga, pelan-pelan merapat menjadi gerakan yang super rapi, hingga akhirnya terinstitusionalisasi dan masuk ke dalam pelukan sistem itu sendiri. Proses ini memang memberi kita selembur kertas legitimasi hukum dan jaminan bahwa kita tidak akan langsung digelandang ke sel saat baru turun dari mobil. Kelihatannya kita menang banyak, tapi ada harga mahal yang diam-diam kita bayar. Kepatuhan kita pada lembar-lembar prosedur birokrasi perlahan tapi pasti telah menjinakkan daya kejut gerakan. Saat kita mengulang-ulang ritme yang itu-itu saja tanpa ada keberanian untuk mendobrak pakem secara radikal, kita sebenarnya sedang menyerahkan peta visual, ruang, dan waktu yang bisa dibaca lawan bahkan sebelum spanduk utama kita dibentangkan.

Sadar atau tidak, jalanan hari ini bukan lagi panggung ledakan politik yang murni spontan. Kita sedang bermain teater. Naskahnya kaku, lengkap dengan pembagian peran yang itu-itu saja. Ada korlap yang teriak-teriak memegang Toa,

ada tim negosiator yang memakai kemeja rapi biar kelihatan intelek, ada massa yang bersorak di belakang sebagai pemandu sorak, dan batas panggunanya adalah kawat berduri yang dijaga aparat bermuka lelah. Ini adalah perilaku yang dihafal di luar kepala, lalu kita pentaskan ulang setiap minggu. Masalahnya, polisi di seberang barikade memegang salinan naskah yang sama persis. Mereka sudah tahu menit ke berapa kita akan pura-pura merangsek maju, dan menit ke berapa kita akan pura-pura lari kocar-kacir demi menciptakan kondisi bubar jalan.

Ketika kita makin taat hukum dan negara makin lihai mengelola manajemen risiko, di situlah gerakan kita kehilangan tajinya. Untungnya, jalanan belum sepenuhnya mati. Kita sempat melihat retakan itu pada 'Peringatan Darurat' Agustus 2024, 'Indonesia Gelap' di awal 2025, hingga eskalasi 'A29-S1'. Saat itu, pakem dua dekade terakhir pecah. Massa bergerak memencar tanpa menunggu komando tunggal dari satu Toa korlap. Intel dan aparat sempat gagap membaca arah angin karena elemen kejutan itu mendadak hidup lagi.

Jadi, kalau hari ini demonstrasi kita kembali membosankan dan mudah ditebak, jangan salahkan korlap di lapangan. Ini adalah dosa kolektif kita yang tanpa sadar telah menelan mentah-mentah aturan main yang disodorkan negara. Kita harus berani menguliti naskah penjinakan ini, kalau tidak mau kejutan taktis ke-marin menguap begitu saja menjadi kembang api yang sebentar lagi padam..

Cara Negara Menjinakkan Kita

Bentuk demonstrasi yang kita jalani hari ini tidak muncul begitu saja dari ruang kosong. Apa yang kita lihat sekarang adalah hasil kompromi panjang, sebuah tarik-menarik tanpa akhir antara taktik perlawanan kita dengan kapasitas kontrol milik negara. Yang perlu kita preteli bersama adalah bagaimana gerakan kita selalu membentur tembok yang sama: perubahan dari sebuah "senjata politik" yang menakutkan menjadi sekadar "koreografi yang indah" di mata publik.

Donatella della Porta dan Herbert Reiter dalam *The Policing of Protest* memberi kita lensa untuk melihat jebakan ini. Mereka membongkar bagaimana cara aparat memperlakukan kita di lapangan secara aktif ikut mendikte bagaimana cara kita bergerak. Ada dialektika tersembunyi yang saling mempengaruhi, namun sering luput dari evaluasi internal kita sendiri.

Coba tengok lembar keramat yang selalu kita siapkan sebelum turun ke jalan: surat pemberitahuan aksi berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998. Entah sejak kapan, kewajiban melapor ke polisi 3x24 jam sebelum aksi ini kita anggap sebagai kemenangan demokrasi. Kita merasa keren karena ada ruang negosiasi, ada

dengan keberanian fisik yang tak terbantahkan, tetapi sering kali mengabaikan pengorganisasian basis mandiri yang solid di akar rumput.

Koreografi lama yang sentralistik dan mudah dikooptasi memang harus ditinggalkan. Namun, alternatifnya bukanlah menciptakan panggung baru yang lebih canggih, melainkan membangun sebuah gerakan horizontal yang tahu persis apa yang ingin dihentikan, di titik mana tekanan sosial harus diberikan, dan bagaimana mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan masyarakat. Selama kita masih enggan keluar dari batas-batas tertib yang dirancang oleh aparat, kita sebenarnya sedang membiarkan potensi perlawanan ini perlahan-lahan melunak di dalam pelukan sistem yang kita kritik.

senyum ramah dari kapolres, dan ada kesan negara sedang akomodatif. Padahal, tepat saat surat itu distempel, kita sedang menyerahkan leher kita sendiri

Secara sukarela kita setorkan nomor HP koordinator lapangan yang bisa diteror intel kapan saja. Kita biarkan rute aksi dikurasi dan dipagari oleh mereka. Bahkan yang paling menjijikkan: kita melatih barisan kita sendiri untuk saling curiga, memelototi kawan sebelah, dan cepat-cepat meneriakkan kata 'penyusup' pada mereka yang ingin bergerak lebih radikal. Semua itu kita lakukan hanya demi mendapat pujian 'tertib dan damai' dari polisi. Kita pulang dengan bangga karena sudah demo dengan 'benar' sesuai standar operasional penguasa. Konyol, tapi kita menganggapnya sebagai tindakan yang taktis dan bijak.

Di sinilah letak ngerinya: belenggu zaman sekarang tidak lagi berbunyi gemerincing di kaki. Ketika kita sudah bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk patuh, negara tidak perlu lagi capek-capek menurunkan pasukan antihuru-hara dengan gas air mata di garis depan. Mereka cukup duduk manis di ruangan ber-AC sambil memantau layar monitor.

Modalnya cuma selembur kertas rute dan jadwal yang kita sepakati tempo hari. Di atas aspal yang kita injak, kamera CCTV dengan sensor pengenalan wajah di sepanjang jalur protokol sudah siap mengunci tiap pergerakan. Sementara itu, beberapa intel berbaju preman menyusup santai di antara barisan, siap memetakan siapa saja aktor kunci yang harus diculik atau dinegosiasi di pojok jalan kalau situasi mulai agak memanas.

Filsuf Henri Lefebvre melalui konsep Spatial Triad mengingatkan kita dengan keras: ruang publik tidak pernah netral. Ruang itu diproduksi, dan siapa yang memproduksinya, dialah yang mendikte aturan main di sana. Jalanan yang kita teriakkan sebagai "medan perlawanan" sebenarnya telah disterilkan dan diukur oleh negara agar aman dari risiko gangguan yang bisa mengguncang kursi kekuasaan. Dampaknya, alih-alih menjadi ancaman politik yang nyata, aksi kita diturunkan derajatnya menjadi sekadar urusan rekayasa lalu lintas belaka—rutin, terjadwal, dan sangat mudah diurai. Koreografi aksi yang kita banggakan sebagai ekspresi otonom ini, nyatanya, adalah produk dari kompromi panjang dengan institusi yang sedang kita lawan.

Jebakan Estetika

Aksi-aksi kita hari ini memang sangat memanjakan mata. Poster satiris dengan tipografi yang dikurasi rapi, asap flaring warna-warni, sampai teatrikal di tengah jalan; semuanya begitu fotogenik, siap jadi santapan empuk algoritma TikTok

dan Instagram. Kita makin ahli mengemas kemarahan menjadi konten visual yang estetik.

Namun, di balik estetika yang estetik itu, ada substansi yang menguap. Ketika kemarahan politik direduksi menjadi sekadar komoditas visual, fungsi asli protes bergeser secara krusial: dari yang seharusnya mengganggu sirkulasi kekuasaan (disrupsi) menjadi sekadar tontonan atau spectacle. Dan tontonan, seperti yang diperingatkan Guy Debord dalam *The Society of the Spectacle*, sama sekali tidak menakuti kekuasaan—ia justru merayakannya. Debord melihat bahwa dalam masyarakat kapitalis lanjut, segala sesuatu yang dulunya dihidupi secara langsung kini bergeser menjadi sekadar representasi citra. Hal ini sudah lebih dalam dijelaskan pada bab pertama di Buku “A29-S1: Mengurai Skenario Busuk Kriminalisasi Massa Aksi 29 Agustus - 1 September” oleh seorang penulis anonim.

Kita di lapangan sekarang lebih sibuk mengecek sudut kamera dan memikirkan apakah estetik atau tidak di layar gawai orang lain, ketimbang memikirkan apakah barisan kita benar-benar berhasil menyumbat sirkulasi kekuasaan. Kita menukar taring politik demi mendapat tombol like. Negara jelas tidak akan takut pada keindahan perlawanan kita. Mereka malah memakai foto-foto aksi damai kita sebagai kosmetik untuk pameran ke dunia luar: ‘Lihat, demokrasi di negara kita sehat walafiat!’.

Estetika protes ini akhirnya cuma berfungsi sebagai katarsis sosial—seperti katup penyelamat pada panci presto yang melepaskan akumulasi ketegangan publik secara terkontrol. Kita diberi ruang untuk berteriak sepuasnya, mengolok-olok pejabat lewat poster jenaka, lalu ketika sore hari tiba dan batas waktu aksi habis, kita pulang ke rumah dengan perasaan lega karena merasa “sudah bersuara”. Sementara itu, kebijakan lalim yang kita kritik, sirkulasi kapital para oligarki, dan operasional lembaga pemerintahan tetap berjalan mulus tanpa ada interupsi sedikit pun. Ini bukan demokrasi; ini cuma terapi kelompok berukuran besar.

Raymond Williams menyebut proses ini sebagai inkorporasi: cara budaya dominan menyerap elemen perlawanan, membuang muatan berbahayanya, lalu menjadikan sisanya sebagai aksesoris dekoratif untuk mempercantik sistem. Poster satiris kita tidak lagi dibakar; mereka justru dipotret oleh aparat sebagai lampiran laporan dokumentasi ketertiban umum. Elemen subversif kita dikomodifikasi dan dinetralisasi dari dalam. Hal ini sangat mirip dengan subkultur Punk dan Casuals yang sudah jauh dari roots awalnya, dari perlawanan kelas berubah menjadi fesyen dan penjenamaan semata.

Tentu saja, kita harus adil melihat argumen tandingan. Sebagian massa berpendapat bahwa estetika dan performativitas adalah strategi krusial untuk mem-

di bab sebelumnya juga menyimpan retakan analitis yang tidak boleh kita tutupi dengan retorika semata.

Hong Kong sempat bergerak seperti air; mereka menolak ditebak, menolak dikepung, dan menolak diidentifikasi oleh arsitektur pengawasan negara. Taktik “Be Water” adalah salah satu inovasi desentralisasi gerakan yang paling mengagumkan—secara taktis. Namun kita harus jujur, ruang gerak itu akhirnya membentur tembok legalisme baru melalui National Security Law 2020. Di sisi lain, Maidan membuktikan bahwa rakyat memiliki kapasitas organisatoris yang luar biasa untuk mengelola dirinya sendiri secara mandiri selama 93 hari di tengah musim dingin ekstrem. Menjadikan kedua kasus itu sebagai cetak biru mutlak tanpa membaca dinamika akhirnya adalah cara kita menghibur diri dengan eksperimen otonomi yang belum selesai. Masalah mendasar gerakan kita bukan hanya soal benturan bentuk—apakah kita harus sepenuhnya hierarkis atau sepenuhnya rimpang (rhizomic). Masalah yang lebih dalam adalah kita belum pernah secara serius memetakan di mana letak ketergantungan nyata dari struktur kekuasaan yang sedang kita hadapi saat ini.

Struktur otoritas di Indonesia disokong oleh koalisi kepentingan konkret dengan jaringan patronase dan basis material yang sangat spesifik. Mengganggu sirkulasi di distrik bisnis Hong Kong memiliki dampak karena posisinya sebagai pusat finansial global, sementara klumpuhan geografis di Kyiv langsung menginterupsi pusat kedaulatan administratif. Pertanyaannya bagi kita: di mana titik jenuh yang membuat kalkulasi kekuasaan di sini benar-benar kehilangan legitimasinya? Yang dibutuhkan gerakan kita bukanlah sekadar imajinasi performatif yang lebih liar, melainkan analisis yang jujur dan tajam mengenai anatomi kekuasaan itu sendiri.

Kita perlu melihat melintasi sekat-sekat sosiologis: mengapa gerakan kita sering kali berjarak dari serikat buruh, komunitas petani, dan jaringan ekonomi informal perkotaan? Konsolidasi sejati tidak terjadi saat kelompok-kelompok ini dijadikan sekadar “massa tambahan” untuk memperbanyak barisan, melainkan ketika setiap elemen bergerak atas kesadaran otonom dan kepentingan material yang nyata untuk menolak tunduk pada kendali sepihak.

Demonstrasi yang mudah ditebak bukanlah kelalaian teknis dari koordinator di lapangan, dan solusinya pun bukan sekadar mengganti formasi barisan. Selama gerakan kita beroperasi tanpa pemahaman atas peta ketergantungan penguasa, maka setiap inovasi taktis berisiko terjebak kembali menjadi sekadar seni pertunjukan yang jinak. Catatan ini ditulis bukan untuk memadamkan api kerakyatan, melainkan karena antusiasme tanpa kejelasan analitis hanya akan menjadi energi yang terserap percuma oleh sistem. Kita sudah terlalu sering turun ke jalan

lalu menjadi instrumen yang menguntungkan narasi negara untuk menjustifikasi tindakan pembatasan ruang aman publik atas nama ketertiban umum.

Meski memiliki kelemahan tersebut, jika kita konfrontasikan dengan kenyataan bahwa demonstrasi kita hari ini sudah mengalami rutinisasi yang membosankan, taktik perlawanan yang cair ini tetap menyediakan jalan keluar yang paling meyakinkan secara teoretis dan praktis. Gerakan sosial kita tidak harus terjebak memilih antara struktur formal yang mudah dikooptasi atau memilih anarki total yang justru menghancurkan diri sendiri. Kombinasi antara konsep *infrapolitics*, struktur organisasi *rhizomik*, dan taktik menyerbu lalu menghilang (*swarming*) menawarkan sesuatu yang benar-benar berbeda: sebuah agensi politik yang lentur, yang menolak untuk dituliskan naskahnya oleh aparat, menolak dikurasi estetika tontonannya oleh media sosial, dan menolak ditenangkan oleh prosedur administrasi kepolisian.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa kita tidak pernah kekurangan keberanian fisik untuk turun ke jalan. Namun, problem terbesar gerakan kontemporer saat ini adalah kelumpuhan imajinasi taktis akibat terlalu lama mengunyah logika kepatuhan yang disodorkan negara dan terbuai oleh katarsis visual di layar gawai. Pertanyaan krusialnya kini bukan lagi tentang apakah kita berani menentang kebijakan yang lalim, melainkan apakah kita punya keberanian eksistensial untuk membubarkan koreografi kita sendiri yang sudah tumpul dan terbaca. Selama kita masih takut keluar dari batas-batas tertib yang direkayasa aparat dan enggan menghentikan sirkulasi nyata kekuasaan, kita sebenarnya sedang membiarkan perlawanan ini mati secara perlahan di dalam pelukan sistem yang kita lawan.

Yang Belum Selesai

Ada jebakan yang diam-diam mengintai setiap analisis gerakan sosial: kita begitu terpesona pada estetika taktis sebuah perlawanan hingga lupa menagih pertanyaan yang paling mendasar—apakah ruang otonom yang kita perjuangkan benar-benar berhasil direbut dan dipertahankan? Esai ini telah mengurai dengan cukup meyakinkan bagaimana demonstrasi kita kerap kali bergeser dari sebuah tindakan subversif menjadi sekadar koreografi, dari gangguan nyata menjadi tontonan, dan dari kejutan taktis menjadi agenda yang terjadwal. Tiga lapisan penjinakan—regulasi prosedural, pengawasan ruang, dan kooptasi estetika—bekerja secara sinergis membentuk sebuah ruang kendali yang tanpa sadar kita ikuti aturan mainnya. Sejauh ini, diagnosis tersebut tidak salah. Namun, resep yang ditawarkan

perluas basis massa di era digital. Tanpa visual yang memikat, isu yang kita bawa berisiko terisolasi dan tenggelam. Pendekatan teatrikal dianggap sebagai pintu masuk yang efektif bagi orang awam agar melek politik. Argumen itu punya validitasnya sendiri dalam jangka pendek.

Tapi jangan amnesia pada efek jangka panjangnya. Ketika visual dijadikan segalanya, gerakan kita otomatis tunduk pada hukum pasar media sosial: sibuk berburu atensi yang dangkal dan cepat basi. Akibatnya, kerja-kerja sunyi yang melelahkan seperti membangun basis akar rumput dan mengkonsolidasikan kekuatan riil di lapangan malah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah bisa mengubah ketimpangan kekuasaan hanya dengan memenangkan perang tagar atau infografis di ruang digital.

Selama demonstrasi kita cuma menempatkan diri sebagai seni pertunjukan yang tertib, kita akan terus berputar-putar di lingkaran setan yang sama. Keindahan visual sebuah protes selalu berbanding terbalik dengan daya dobrak taktisnya. Kalau estetika sudah mengalahkan disrupsi, demo kita tidak lebih dari sekadar upacara tahunan yang mandul: sebuah teater sosial yang naskahnya kita tulis sendiri, tapi disutradarai—dan ditepuktangani dengan nyaman—oleh negara.

Memecah Naskah

Jika regulasi hukum, pengawasan ruang, dan jebakan estetika tontonan sudah berhasil menjinakkan aksi jalanan kita menjadi sekadar ritual pelepasan stres—lalu apa lagi yang tersisa bagi gerakan kita? Pertanyaan ini bukan retorika belaka, melainkan sebuah tuntutan mendesak untuk mencari jawaban yang melampaui pagar pembatas milik negara. Gerakan sosial tidak bisa lagi bersandar pada “koreografi formal” yang strukturnya hierarkis, terpusat, dan sangat mudah diprediksi. Koreografi model begitu sudah khatam dibaca dan dikelola oleh lawan. Satu-satunya jalan untuk merebut kembali kekuatan perlawanan kita adalah dengan mematahkan naskah itu sendiri: bertransformasi menjadi bentuk perlawanan yang tidak terbaca oleh aparat keamanan dan menolak mentah-mentah untuk diserap oleh logika birokrasi kekuasaan.

James C. Scott memberi kita titik awal yang baik lewat konsepnya tentang *infrapolitics* dan *everyday forms of resistance* (perlawanan sehari-hari). Scott mengingatkan bahwa analisis politik yang terlalu terpaku pada demonstrasi besar-besaran di alun-alun kota atau di depan gedung DPR sering kali melewatkan dinamika perlawanan yang sesungguhnya di akar rumput. *Infrapolitics* beroperasi di bawah radar, sebuah resistensi yang terselubung, tidak vulgar, dan sengaja

menghindari panggung formal yang mudah dikepong oleh arsitektur pengawasan negara. Bentuk perlawanan ini tidak perlu mengirimkan surat pemberitahuan tiga hari sebelumnya ke kantor polisi.

Tetapi, agar taktik yang tersebar di bawah radar ini punya daya dobrak politik yang signifikan secara nasional, struktur organisasi gerakan kita juga perlu dirombak total dari dalam. Di sinilah Gilles Deleuze dan Félix Guattari menawarkan sebuah model yang lebih dari sekadar metafora tumbuhan: mereka menawarkan konsep rhizome (rimpang) sebagai model organisasi perlawanan. Berbeda dengan struktur pohon yang hierarkis, kaku, dan berakar tunggal di bawah, struktur rhizomik bergerak secara horizontal, memencar tanpa arah tunggal, dan hebatnya bisa tumbuh kembali dari titik mana pun jika salah satu bagiannya diputus oleh musuh. Gerakan model rimpang ini tidak memiliki "jantung", artinya tidak ada komando pusat yang tunggal, tidak ada koordinator lapangan formal yang bisa dengan mudah diidentifikasi, diajak negosiasi, atau dilumpuhkan oleh intel aparat. Ketika negara mencoba membaca gerakan ini denganacamata birokrasi mereka yang kaku (atau memakai istilah Scott: *seeing like a state*), mereka akan bingung karena mendapati sebuah entitas gerakan yang tidak memiliki alamat tunggal untuk dikirimkan represi ataupun kooptasi politik.

Manifestasi paling konkret dari model cair ini bisa kita lihat pada gerakan "Be Water" di Hong Kong pada tahun 2019 lalu. Mengambil inspirasi dari filosofi bela diri Bruce Lee, para demonstran di sana menolak untuk menduduki satu ruang publik secara permanen. Keputusan ini kontras sekali dengan Gerakan Payung (Umbrella Movement) tahun 2014, yang waktu itu sangat mudah dievakuasi dan dibubarkan aparat karena lokasinya terfokus di satu titik saja. Sebaliknya, dalam gerakan "Be Water", mereka bergerak secara asimetris: berkumpul dengan sangat cepat di satu titik ekonomi yang vital (seperti sistem transportasi massal, distrik bisnis, atau infrastruktur logistik), menginterupsi fungsinya selama beberapa jam saja, lalu langsung mencair dan melarut sebelum aparat sempat membangun formasi blokade. Tak lama kemudian, mereka mendadak muncul lagi di lokasi lain yang sama sekali tidak terduga.

Ketika taktik asimetris ini menemui titik kulminasinya, kita dipaksa melihat contoh radikal yang terekam dalam dokumentari *Winter on Fire*—sebuah visualisasi nyata dari Revolusi Maidan di Ukraina (2013–2014) tentang bagaimana massa beralih dari demonstrasi prosedural menjadi perlawanan terorganisasi yang defensif sekaligus ofensif. Taktik Maidan menunjukkan transformasi ruang protes dari sekadar "panggung teater" sementara menjadi sebuah benteng otonom (fortified camp) yang menetap di tengah kota. Massa aksi menolak tunduk pada ritme jam malam birokrasi; mereka tidak lagi pulang saat sore hari tiba, melain-

inkan mendirikan kemah-kemah semi-permanen, menyusun barikade tinggi dari ban bekas, salju yang membeku, hingga kendaraan roda empat, serta membentuk sistem pertahanan berlapis menggunakan tameng kayu dan helm konstruksi untuk menahan gempuran pasukan khusus Berkut.

Lebih jauh lagi, taktik *Winter on Fire* merepresentasikan bekerjanya struktur rhizome yang cair namun militan melalui pembentukan infrastruktur pendukung yang sangat organik di dalam kamp. Keberhasilan mereka bertahan selama 93 hari di tengah musim dingin ekstrem bukan digerakkan oleh komando tunggal partai politik, melainkan karena pembagian kerja sukarela yang luar biasa: adanya dapur umum yang menyuplai makanan tanpa henti, posko medis darurat yang dikelola dokter sukarelawan, hingga unit logistik khusus yang bertugas membelah batu jalanan untuk dijadikan amunisi defensif. Taktik ini memecah naskah penjiakan negara karena Maidan berhasil mendisrupsi total pusat geografis kekuasaan di Kiev dan mengubah kalkulasi risiko aparat—menunjukkan bahwa ketika sebuah gerakan mampu mengorganisasi dirinya secara mandiri tanpa bergantung pada izin birokrasi, estetika protes akan luruh dan berubah menjadi agensi politik yang sangat ditakuti oleh rezim.

Yang terjadi di sini bukan sekadar perubahan taktik di lapangan belaka, melainkan ada pergeseran kalkulasi risiko yang jauh lebih fundamental. Ketika target aksi kita beralih dari ruang-ruang simbolis (seperti Gedung DPRD dan DPR RI yang sebenarnya sudah dikondisikan negara sebagai medan steril) ke interupsi langsung pada ruang ekonomi vital seperti di Hong Kong atau pendudukan total ruang kedaulatan seperti di Maidan, demonstrasi kita berhenti menjadi sekadar masalah manajemen lalu lintas. Gerakan tersebut bertransformasi menjadi gangguan nyata terhadap sirkulasi kapital dan legitimasi fisik yang menyokong stabilitas rezim penguasa. Dan hal ini mengubah seluruh konstelasi pertempuran politik.

Namun, refleksi di lapangan juga menuntut kita untuk secara jujur membaca dinamika internal yang melekat pada model desentralisasi cair ini. Tanpa adanya hierarki formal, tantangan terbesar bagi gerakan horizontal sering kali muncul ketika harus mengonsolidasikan berbagai gagasan organik menjadi satu arah wacana yang solid, terutama di momen-momen krusial saat peluang perubahan sistemik mulai terbuka di depan mata. Ketiadaan pusat komando tunggal juga menuntut kedewasaan taktis yang tinggi; tanpa koordinasi horizontal yang matang, gerakan ini rentan mengalami fragmentasi internal. Selain itu, kelenturan di lapangan terkadang berisiko dimanfaatkan oleh provokasi luar yang sengaja memicu tindakan-tindakan di luar koridor taktis gerakan. Kita semua memahami bahwa distorsi informasi atau penyematan label negatif oleh media arus utama se-